



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1998. *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Brown, Bernard E & Marcrdis, Roy C. 1992. *Perbandingan politik*. Erlangga, Jakarta
- Combs, Philip H dan Ahmed, Manzoor. 1984. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal*. CV Rajawali, Jakarta.
- Courtemanche, Gil. 1997. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Kanisius, Yogyakarta
- Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan, pada dan setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*. LPIST dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 1984. *Public Policy Analysis : An Introduction, Prentice-Hall International*. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Edi, Busti. 2000. *Proses implementasi kebijakan program pemberdayaan Daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE). Thesis (Tidak Dipublikasikan)*. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2006. *Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi*, makalah disampaikan pada Seminar “ Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Gibson, Ivansevich. 1996. *Organisasi : Prilaku, Struktur, dan Proses*. Edisi Kedelapan Jilid I. Bina Putra Aksara, Jakarta.
- Harman, G. 1974. “*Reassing research in the poltics of education. In Education Research and Perspective (the Governance of Education)*”. Department of Education, University of Western Australia.
- Hasbullah. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Kependidikan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara sedang Berkembang*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ihsan, Fuad. 2005. *Dasar-dasar Kependidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.



- Imawan, Riswandha. 1999. *Kebijakan Publik*. Program Studi MAP-UGM, Yogyakarta.
- Jalal, Fasil, dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Jones, O. Charles. 1984. *An Introduction To the Study of Public Policy*. Monterey, California.
- Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Holistik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lester, James P dan Joseph, Stewart. 2000. *Public Policy : an Evolutionary Approach*. Second Edition. Wadsworth, Australia.
- Maksum Ali, Ruhendi, dan Luluk, Yunan. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern*. IRCiSoD. Gowok, Yogyakarta.
- Meter, Donald S. Van dan Horn, Carl E. Van. 1975. "The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework" di dalam *Administration dan Society*. Vol. 6, No. 4.
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ripley, Randai B and Franklin Grace A. 1986. *Policy Implementation an Beureaucracy*. The Dorsey Press, Chicago Illionis.
- Singarimbun, Masri dan Eifendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Surve*. LPES, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 1984. *Pola Partisipasi orang Miskin di Kota*. Prisma, Vol. 5/ Mei



Suyanto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta.

Wibawa, Samodra Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

### Dokumen

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 21 a tahun 2005, tentang Pembebasan Biaya Sekolah Tingkat SMA, SMK dan MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sinjai.

Laporan Kerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK.

Laporan Perkembangan Millenium Indonesia 2004.

Laporan Statistik: Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2005.

Laporan Statistik: Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2006.

Renstra Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008



**Internet**

[www.adb.org/statistics](http://www.adb.org/statistics)

[www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id)

[www.jembrana.go.id](http://www.jembrana.go.id)

[www.sinjai.go.id](http://www.sinjai.go.id)

[www.sinjaikab.go.id](http://www.sinjaikab.go.id)

[www.tifafoundation.com](http://www.tifafoundation.com)

[www.undp.com](http://www.undp.com)